Kebebasan berekspresi dan paradoks privasi dalam hubungan pertemanan

Musfiah Saidah^{*)}, Irwansyah
Universitas Indonesia

Program Pascasarjana UI Salemba, Jakarta, Indonesia
Email: musfiahsaidah@gmail.com/ Phone +6221 7276000

How to Cite This Article: Saidah, M., Irwansyah, I. (2019). Kebebasan berekspresi dan paradoks privasi dalam hubungan pertemanan. *Jurnal Studi Komunikasi*, 3(2). doi: 10.25139/jsk.3i2.1683

Received: 27-05-2019,
Revision: 15-06-2019,
Acceptance: 26-06-2019,
Published online: 02-07-2019

English Title: Freedom of Expression and the Paradox of Privacy in Friendship

Abstract The development of information technology is misinterpreted as a place of expression without control. Social media has blurred the boundary between private space and public space. Frequent phenomena such as taking and using photos of friends without permission. This seems to be a paradox between the right to freedom of expression in friendship. This study aims to assess freedom of expression and the limitations of privacy in cyberspace. The researcher will examine several cases of violations of privacy through photos and their impact on victims. This research method uses a qualitative approach. The technique of collecting data uses interviews, literature studies and documentation. The theory used is the theory of computer-mediated communication and using the concept of a privacy violation to help answer problems in this study. Through this research, it is expected to obtain applicative solutions in an effort to resolve privacy issues and limits in friendship.

Keywords: Freedom of expression; photos; privacy; friendship.

Abstrak Perkembangan teknologi informasi disalahartikan menjadi ajang berekspresi tanpa kendali. Media sosial telah mengaburkan batasan antara ruang pribadi dan ruang publik. Fenomena yang sering terjadi seperti mengambil dan menggunakan foto teman tanpa izin. Hal tersebut seakan menjadi paradoks antara hak kebebasan berekspresi dalam hubungan pertemanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengakaji tentang kebebasan berekspresi dan batasan privasi di dunia maya. Peneliti akan mengkaji beberapa kasus pelanggaran privasi melalui foto dan dampaknya terhadap korban. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, studi literatur dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori computer mediated communication

^{*)} Corresponding Author

dan menggunakan konsep *privacy violation* untuk membantu menjawab masalah dalam penelitian ini. Melalui penelitian ini diharapkan akan memperoleh solusi aplikatif dalam upaya penyelesaian masalah privasi dan batasnya dalam hubungan pertemanan.

Keywords: Freedom of expression; photos; privacy; friendship.

PENGANTAR

Perkembangan teknologi informasi disalahartikan menjadi ajang berekspresi tanpa kendali. Pengguna internet terdorong untuk mengungkapkan diri (*self-disclosure*) dengan berbagai alasan. Hal tersebut menyebabkan terbukanya data pribadi tanpa disadari sehingga membuat perubahan besar terhadap pola interaksi dalam hubungan pertemanan. Pengguna media sosial dengan mudah mengambil, merekam dan membagikan foto orang lain. Ini membuktikan bahwa media sosial tanpa disadari telah mengubah kebiasaan dan cara pandang dalam memperlakukan privasi. Di satu sisi penggunaan media memberikan manfaat terhadap kemudahan dalam berkomunikasi, namun di sisi lain memberikan ancaman terhadap terbukanya privasi. Penelitian ini akan berfokus pada hubungan pertemanan yang biasanya semakin bias terkait makna privasi seiring dengan kedekatan yang terjadi. Namun makna dekat bagi setiap orang berbeda sehingga terjadi *gap* dan disonansi yang berakibat pada pelanggaran privasi.

Pada dasarnya, privasi adalah kemampuan individu untuk mengontrol informasi tentang diri mereka sendiri (Bhasin, 2006). Tetapi kemajuan media sosial membuat makna privasi semakin biasa. Terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang privasi. Namun perjuangan melawan dampak negatif teknologi informasi adalah perjuangan untuk senantiasa membiasakan mengelola diri di era keterbukaan informasi. Masyarakat hendaknya memperhatikan rahasia antara yang patut dan tidak. Dari hasil sintesa yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa penelitian tentang privasi diantaranya: Penelitian Melissa Miles (2015), berjudul *Photography, Privacy and the Public* yang membahas tentang pembuatan tindak pidana baru untuk menangani penggunaan foto anak-anak yang tidak mana ada harapan akan privasi. Sehingga muncul wacana publik sebagai seruan untuk mendukung berbagai pembatasan fotografi di depan umum. Selanjutnya penelitian Madan Lal Bhasin (2006), berjudul *Guarding Privacy on the Internet* yang membahas tentang privasi sebagai kemampuan individu untuk mengontrol informasi tentang diri mereka sendiri dan potensi tiga pihak dapat melanggar privasi individu yaitu pemerintah, bisnis, dan pengusaha.

Media merupakan wadah komunikasi untuk menyampaikan dan menerima informasi. Namun keinginan untuk mengungkapkan diri membuat batasan privasi semakin lebur. Kehadiran media sosial mendorong seseorang untuk memberikan informasi pribadi sebagai salah satu proses komunikasi, tanpa mempertimbangkan dampak dari berbagai informasi yang diberikan di masa depan. Dalam penelitian

privasi yang melibatkan interaksi dengan orang lain, Claire Balleys dan Sami Coll (2017) yang berjudul *Being Publicly Intimate: Teenagers Managing Online privacy* menjelaskan arti privasi bagi remaja dan cara mereka mengalaminya di antara mereka sendiri di jejaring sosial. Selanjutnya penelitian Beate Roessler and Dorota Mokrosinska (2013) tentang *Privacy and social Interaction* yang membahas paradoks privasi antara kepentingan individu dan interaksi di masyarakat. Dari berbagai penelitian tersebut peneliti tertarik untuk melihat dari sisi pengambilan foto tanpa izin sebagai sebuah pelanggaran jika dihadapkan dengan hubungan pertemanan yang telah dianggap telah mengaburkan batas privasi. Berangkat dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam seputar privasi dalam hubungan pertemanan dalam batas yang telah dilanggar dan bias dalam interaksi yang dimediasi oleh teknologi.

Privasi menurut Sandra petronio didefinisikan sebagai perasaan bahwa seseorang memiliki hak untuk memiliki informasi pribadi, baik secara pribadi atau kolektif. Hal tersebut menyebabkan terdapat batas dalam kepemilikan untuk individu. Batasan pribadi merupakan batasan yang mengatur informasi pribadi tentang diri, sementara batas-batas yang dipegang bersama mewakili berbagai jenis batas privasi (Petronio, 2013). Sedangkan Privasi Menurut Beate Roessler umumnya didefinisikan sebagai hal terkontrol akses ke informasi pribadi. Argumen ini menekankan bahwa kemampuan individu untuk mengontrol akses ke informasi pribadi terkait dengan jenis hubungan dimana orang tersebut terlibat.

Privasi merupakan bagian dari ekspresi dalam masyarakat demokratis yang diakui baik secara eksplisit maupun implisit sebagai hak asasi manusia. Saat ini privasi didefinisikan sebagai hak atas informasi penentuan nasib sendiri, yaitu hak individu untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana, sampai sejauh mana dan untuk apa tujuan informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain (Fischer-Hübner & Hedbom, 2013). Sementara Warren dan Brandeis sering menekankan pengertian privasi sebagai hak untuk presentasi diri selektif yaitu untuk mengontrol bagaimana, kapan, dimana aspek kehidupan dan kepribadian seseorang dikomunikasikan. Oleh karena itu, tantangan terus-menerus adalah menemukan prinsip seleksi ini, menjelaskan variasinya dari satu konteks sosial ke yang berikutnya, dan menemukan landasan hukum untuk kontrolnya oleh individu (Baghai, 2012).

Pekembangan internet membuat informasi semakin mudah tersebar. Keamanan jaringan dan tantangan privasi ada secara luas di sebagian besar lapisan IoT (Gai, Qiu, Xiong, & Liu, 2018). Hal tersebut membuat seseorang perlu memiliki batasan informasi terkait dirinya. Terdapat batasan yang dimiliki seseorang yaitu batasan antara sesuatu yang bersifat publik maupun yang rahasia atau tidak ingin dibagi. Artinya, privasi yang dimaksud dalam teori manajemen privasi komunikasi hadir sebagai sesuatu yang memiliki nilai dalam caranya sendiri, tidak secara relasional memiliki arti yang lebih inferior

dibandingkan dengan keterbukaan, transparansi, atau keterbukaan diri (Griffin, 2011). Batasan tersebut perlu dimiliki karena dalam perilaku online terkait privasi terdapat 'paradoks privasi' yang mengacu pada perbedaan antara sikap pengguna terhadap privasi dan perilaku mereka yang sebenarnya (Barth, de Jong, Junger, Hartel, & Roppelt, 2019). Oleh karena itu privasi dalam penelitian ini diartikan sebagai informasi pribadi yang dimiliki seseorang. Namun batas privasi yang dimiliki seseorang dilanggar oleh orang lain sehingga mengakibatkan terjadinya privasi violation (pelanggaran privasi).

Terdapat dua tipe pelanggaran dalam privasi yaitu internal violations of privacy dan external violations of privacy (Roessler & Mokrosinska, 2013). Dalam menganalisis kebijakan privasi dari perspektif konsumen, perbedaan antara dimensi privasi yang berbeda harus diakui. Lee dan LaRose (1994) mensintesis studi sebelumnya tentang dimensi privasi (LaRose & Cho, 1999). *Pertama*, privasi informasi menetapkan tingkat dimana orang mengumpulkan dan mengedarkan informasi. Misalnya pelanggaran privasi informasi di Internet merusak dengan membangun pemahaman publik tentang aliran informasi pribadi terkomputerisasi yang tidak terkendali. *Kedua*, privasi fisik melibatkan akses ke bangunan atau badan seseorang. *Ketiga*, psikologis privasi yang dapat digambarkan sebagai keintiman dan kedalaman pertukaran dengan yang lain, yang melibatkan baik input dari orang lain yang terkena dan output dari apa yang diungkapkan seseorang kepada orang lain.

Berbagai pelanggaran privasi tidak terlepas dari sifat dasar manusia yang memiliki keinginan mengungkapkan diri. Namun privasi jika dikelola dengan baik maka dapat menjadi salah satu elemen dalam pengelolaan hubungan, sebagaimana pendapat Petronio, privasi dan pengungkapan memiliki makna karena penting bagi cara seseorang mengelola hubungan (Petronio, 2013). Artinya keinginan mengungkapkan diri dan pengelolaan privasi adalah sesuatu yang berkaitan asalkan dimaknai dengan baik. Oleh karena itu penting adanya pengelolaan hubungan yang baik.

Selain dari sisi pribadi, berbagai pelanggaran privasi tidak terlepas dari belum mapannya regulasi yang ada. Regulasi terkait perlindungan data pribadi di Indonesia sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pasal 26. Walaupun demikian, Undang-Undang tersebut sebenarnya belum memuat aturan khusus tentang perlindungan data. Sehingga, Rancangan Undang-Undang terkait Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) dicetuskan demi menanggulangi maraknya kasus penyalahgunaan data pribadi di negeri ini. Dalam posisi ini menarik untuk menyoroti pentingnya peran pengguna media sosial untuk mengelola data diri. Selain itu, menurut UUD 1945 Pasal 28 G menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat

sesuatu yang merupakan hak asasi (Negara et al., 1945). Namun pengaplikasiannya belum berjalan maksimal terutama jika dihadapkan dengan pemaknaan privasi yang berbeda bagi setiap orang.

Kecanggihan media sosial membuat seseorang dengan mudah mengambil dan membagikan foto orang lain tanpa izin padahal hal tersebut dilarang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 pasal 1 menjelaskan bahwa Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (UU No. 20 Tahun 2008, 2008).

Berbagai pelanggaran yang terjadi tidak terlepas dari kenyataan jika saat ini privasi dimediasi melalui interaksi teknologi digital, institusi dan praktik komunikasi sehari-hari. Dalam perspektif komunikasi *Computer Mediated Communication* (CMC) didefinisikan sebagai suatu transaksi komunikasi yang terjadi melalui penggunaan dua atau lebih computer jaringan. CMC berfokus terutama pada dampak sosial yang berbeda yang didukung teknologi komputer. Saat ini komunikasi melalui komputer, tidak seperti media sebelumnya. Komunikasi membuat informasi baru dan berharga dalam penggunaannya (Cooper, 2011). Komunikasi yang dimediasi komputer telah menghilangkan isyarat nonverbal yang biasanya sinyal hubungan keakraban, pengguna CMC harus bergantung pada pesan teks saja untuk menyampaikan informasi sosial yang sama. Isyarat verbal dan nonverbal bisa digunakan secara bergantian.

Pihak yang bertemu online dapat mengembangkan hubungan yang sedekat hubungan yang terbentuk secara langsung meskipun demikian membutuhkan waktu lebih lama. Jika hubungan dimediasi, maka hubungan antara masalah privasi dan pengungkapan rahasia dapat dijelaskan melalui tautan antara privasi dan variabel situasional. Namun, hubungan yang cukup dekat akan mengira bahwa ada interaksi antara masalah privasi dan variabel situasional dapat dijelaskan dengan perilaku (Joinson, Reips, Buchanan, & Schofield, 2010). Ketika pengirim online memilih, penerima memperbesar, saluran mempromosikan, dan umpan balik meningkatkan kesan yang menguntungkan, CMC dapat menciptakan hyperpersonal hubungan (Griffin, 2011). Orang-orang percaya bahwa mereka sendiri dan memiliki hak untuk mengendalikan informasi pribadi mereka; mereka melakukannya dengan menggunakan pribadi aturan privasi. Ketika orang lain diberi tahu, mereka menjadi pemilik bersama informasi tersebut. Jika pemilik bersama tidak secara efektif menegosiasikan aturan privasi yang disepakati bersama mengatakan kepada pihak ketiga, turbulensi batas adalah hasil yang mungkin.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pelanggaran privasi komunikasi, Strategi penelitian yang digunakan adalah konstruktivis. Guba dan Lincoln menjelaskan jika konstruktivis dimulai dengan sebuah premis bahwa dunia manusia berbeda dengan dunia fisik oleh karena itu perlu dipahami secara berbeda. Konstruktivis mempelajari berbagai macam realita yang dikonstruksikan manusia dan implikasi dari konstruksi tersebut terhadap hidup dan interaksi manusia (Patton, 2002). Penelitian ini menggunakan strategi penelitian konstruktivis untuk melihat untuk mempelajari pemahaman dalam memperlakukan privasi dengan mengacu pada pengalaman unik dan spesifik dari informan. Sedangkan Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini adalah tiga orang informan dengan metode pemilihan menggunakan metode *purposive sampling* dengan memilih informan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Adapun kriteria informan yaitu pernah mengalami pelanggaran privasi dalam hubungan pertemanan dan aktif menggunakan sosial media

Kriteria informan dibuat dengan mengasumsikan dapat memberikan informasi berkaitan dengan penelitian secara mendalam. Pemilihan kriteria pernah mengalami pelanggaran privasi dipilih untuk menjadi kasus yang dibahas dalam penelitian ini. Sedangkan kriteria aktif dalam melakukan aktifitas di media sosial dipilih dengan harapan jika informan termasuk menggunakan sosial untuk berbagai maupun mendapat informasi sehingga membuka peluang terbukanya privasi. Sedangkan untuk menambah data, peneliti juga melakukan wawancara dengan ahli untuk memberikan pandangan terhadap masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini.

Tabel 1. Nama Informan

No	Nama	Keterangan
1	Informan 1	Jenis Kelamin: Laki-laki Tingkat Pendidikan: Mahasiswa S2 Usia: 25 Tahun
2	Informan 2	Jenis Kelamin: Perempuan Tingkat Pendidikan: Mahasiswa S1 Usia: 20 Tahun
3	Informan 3	Jenis Kelamin: Perempuan Tingkat Pendidikan: Mahasiswa S1 Usia: 25 Tahun
4	Nabilah Saputri	SefeNet (organisasi yang memperjuangkan hak digital warga di Asia Tenggara)
5	Muhammad Iqbal, Ph. D	Dekan Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana

DISKUSI

Potret Kasus Privasi dalam Hubungan Pertemanan

Pelanggaran privasi dalam hubungan pertemanan seakan bias di era digital seperti saat ini. Hal ini disebabkan karena munculnya anggapan dan semakin mengecilnya jarak hubungan. Namun privasi tetap menjadi hak seseorang yang perlu di hormati dan dijaga oleh orang lain. Apabila hal tersebut diabaikan maka dapat menimbulkan permasalahan dalam pertemanan maupun kesalahpahaman dalam benak orang lain. Berikut akan dipaparkan beberapa kasus pelanggaran privasi dengan foto yang dialami oleh tiga informan.

Informan pertama berinisial SSO mengalami permasalahan dengan temannya. Cerita berawal ketika SSO terlambat datang ke suatu acara dan membuat teman-teman lain mencarinya. Kondisi sinyal saat itu sangat sulit karena lokasi berada di hutan hingga akhirnya seorang teman menemukannya dan memabil gambar SSO yang sedang memegang tablet sehingga menimbulkan kesan jika SSO malah asyik bermain gawai ketika teman-teman lain mengkhawatirkannya. Sayangnya SSO tidak mendapatkan kesempatan untuk klarifikasi karena kondisi saat itu kurang memungkinkan. Namun SSO mengakui jika kejadian sangat tidak mengenakan. Sebagaimana keterangan korban

Waktu itu sempat gak enak sama teman-teman yang lain. Tetapi saya gak bisa apa-apa karena sata itu kondisinya kurang memungkinkan untuk menjelaskan. Dampaknya cukup fatal karena menimbulkan salah persepsi. Itu seperti cambuk bagi saya supaya lebih berhati-hati. Permasalah menjaga privasi orang lain merupakan hal yang penting (Informan 1)

Dalam kasus ini, pelanggaran privasi yang terjadi adalah mengambil foto orang lain tanpa izin dan menyebarkannya di grup whatsapp sehingga menimbulkan kesalah pahaman.

Informan kedua berjenis kelamin perempuan. Perempuan beinisial Y ini merasa kurang nyaman ketika ada laki-laki yang mengambil foto profil di whatsapp miliknya tanpa izin dan diunggah ke akun pribadinya dengan keterangan "adem banget yah". Informan merasa risih dan takut karena orang tersebut merupakan teman baru yang dalam beberapa waktu ke depan akan menjadi kawan dalam sebuah kegiatan pengabdian di desa. Ditambah lagi pelaku juga menyebarkan nomor informan ke teman yang lain tanpa seizin korban. Dampaknya ada beberapa orang yang tidak dikenal menghubungi dirinya dan membuat dia menjadi risih. Sebagaimana keterangan korban

Temannya ngechat aku untuk ngajak kenalan. Sedangkan aku bukan tipe orang yang mudah kenal di media sosial, jadi aku risih banget di chat terus. Aku takut dan risih banget. Jujur aku sampai

nyari ada atau engga UU tentang nyebar nomer telepon itu sebenarnya gak boleh. (Informan 2)

Dalam kasus ini pelanggaran yang terjadi adalah mengambil foto profil whatsapp tanpa izin dan menjadikannya story dengan caption yang kurang pantas. Padahal dalam posisi tersebut pertemanan baru terjalin.

Informan ketiga berjenis kelamin perempuan berinsial RKS. Dia menjadi korban pelanggaran privasi setelah foto profil facebooknya digunakan oleh teman laki-lakinya ketika SMA sebagai gambar di facebook pribadinya tanpa seizin korban untuk menunjukkan kepada mantan istrinya jika mereka memiliki hubungan. Padahal dalam kenyataannya mereka tidak demikian. Sebagaimana keterangan korban

Dia ingin menunjukkan kepada mantan istrinya bahwa saya dan dia memiliki hubungan. Padahal saya gak ada hubungan sama sekali dengannya. Dia cuma senior saya di SMA dan kami juga tidak pernah komunikasi. (Informan 3)

Dalam kasus tersebut pelanggaran privasi adalah mengambil foto tanpa izin dari media sosial facebook dan menjadikannya profil picture dengan motif yang dapat merugikan korban. Hal tersebut tentu merugikan korban dan membuatnya takut karena dikhawatirkan dapat menimbulkan kesalahpahaman orang lain. Selain itu pelaku juga membuat unggahan di facebook menggunakan foto yang sama dengan keterangan yang menggambarkan jika mereka memiliki hubungan.

Berdasarkan data yang dihimpun dari narasumber dapat diketahui jika ketiga kasus yang dipaparkan diatas pelanggaran secara umum terkait fotografi yang dirasakan adalah mengambil gambar secara langsung maupun melalui media sosial tanpa izin. Ketiga kasus tersebut menunjukkan jika dampak terhadap tindaknya yang mungkin dianggap biasa oleh orang lain ternyata dapat menimbulkan ketidaknyamanan atau bahkan menimbulkan konflik. Privasi dengan demikian ditegaskan sebagai masalah utama dalam penggunaan individu dan sosial teknologi komunikasi baru. Melalui proses seperti kemunculan media sosial dan internet Internet of Things, Internet nampaknya semakin terhubung dengan sosial kita dan, masing-masing, kehidupan fisik. Ini lagi-lagi dapat menimbulkan jenis baru dari tantangan privasi untuk diawasi dan dikomunikasikan oleh media.(von Pape, Trepte, & Mothes, 2017).

Teknologi digital dan internet tersebut memberikan perubahan terhadap gaya hidup masyarakat karena ruang dan waktu semakin tidak lagi berjarak. Akses informasi semakin mudah didapat dan diproduksi. Meskipun banyak manfaat menambahkan teknologi informasi dan komunikasi dalam instrument peneliti lapangan, namun juga terdapat tantangan etika baru seperti mempertahankan digital keamanan. Fenomena pelanggaran privasi terkait tiga kasus yang dipaparkan merupakan pelanggaran privasi informasi. Pelanggaran terkait privasi informasi yang dilakukan dengan mengambil foto pribadi orang lain dan

menyebarkannya atau menggunakannya di media sosial. Hal tersebut juga telah melanggar privasi sosial karena berkaitan dengan relasi sosial yang termediasi oleh teknologi. Secara hukum hal tersebut merupakan pelanggaran karena telah mengambil dokumen elektronik milik orang lain tanpa seizin pemilik.

Selain itu, jika melihat dampaknya kepada korban, pelanggaran privasi selain dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan berpotensi merusak citra. Bukan hanya saat kejadian tetapi jangka panjang dalam jejak digital. Sebagaimana pendapat Nabilah Saputri dari SafeNet

Nah yang diambil adalah citra. Misal kalo nanti melamar kerja akan teringat jika orang itu memiliki jejak digital yang kurang baik. Karena nyatanya dilihat dari rekam jejak digital. (Nabilah Saputri, Wawancara Pribadi 20 Mei 2019)

Hal ini merupakan hal yang biasanya diabaikan oleh orang lain termasuk dalam hubungan pertemanan. Foto maupun konten yang diunggah hari ini akan tersimpan bukan hanya dalam rekan digital tetapi juga dalam memori orang lain. Privasi kini telah memainkan peran penting dalam memfasilitasi definisi-diri, bahkan ketika berada di depan umum. Inilah yang memungkinkan seseorang menampilkan versi yang diedit dari diri audiensi yang berbeda, dan hanya mengekspos aspek-aspek diri yang diinginkan orang lain. Sentralitas otonomi pribadi dan individualisme dalam wacana privasi tercermin dalam persepsi yang berkembang tentang citra diri kita sebagai milik kita. (Miles, 2015).

Tindakan mengambil foto orang lain dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi berpotensi menimbulkan citra buruk kepada korban. Kondisi tersebut bukan hanya berlaku saat ini namun juga membekas dalam memori yang akan di ingat sampai di masa yang akan datang. Sedangkan dalam pandangan psikologis, kemajuan teknologi informasi membuat akses informasi semakin mudah sehingga seseorang kehilangan kemampuan mengatur diri. Sebagaimana pendapat seorang psikolog, Muhammad Iqbal, Ph.D.

Fasilitas media sosial saat ini memudahkan seseorang untuk merekam maupun menyebarkan. Ruang maya menjadi ruang tersendiri dalam hidupnya untuk berekspresi. (Muhammad Iqbal, Wawancara Pribadi 21 Mei 2019)

Padahal pertemanan menunjukkan seperti apa persahabatan yang selaras dengan kompas moral. Teman-teman menegosiasikan hubungan mereka secara sukarela, saling memperhatikan kesejahteraan satu sama lain, saling menghargai, dan terlibat dalam saling belajar satu sama lain. Mereka juga percaya dan dapat dipercaya, masing-masing jujur, dan memberikan perhatian khusus pada kebutuhan dan keinginan orang lain. Apabila telah terjadi pelanggaran, para korban memilih untuk diam walaupun mengetahui jika hal tersebut merupakan pelanggaran dan tindakan yang kurang menyenangkan. Secara aturan hukum hal tersebut telah diatur, namun terdapat

kekhawatiran jika apabila hal tersebut ditindaklanjuti akan menimbulkan kesan berlebihan pada orang lain. Sebagai mana pendapat informan kedua

Dia sudah minta maaf walaupun setelah itu aku jadi males ketemu dia. Aku sebenarnya merasa risih tetapi khawatir jika ditindaklanjuti orang lain merasa ini masalah sepele dan dianggap berlebihan jika melaporan. Walaupun aku ngerasa ini sudah melanggar privasi ku, dia bukan hanya menyimpan foto aku tanpa izin tetapi juga mengunggah di status whatsapp. (Informan kedua).

Sedangkan informan pertama mengaku jika dia memahami jika apa yang dialaminya merupakan pelanggaran privasi, namun saat ini dia memilih untuk menerima dan tidak ada permintaan maaf dari pelaku, sebagaimana keterangan informan pertama

Dia gak minta maaf sama sekali karena mungkin dia gak tau jika itu pelanggaran privasi dan sebuah kesalahan dan karena kejadian itu saya disalahkan karena dikira main tab. Saya memahaminya sebagai bentuk pelanggaran karena konteksnya dalam situasi yang agak formal dan saat ini saya sudah memaafkan. (Informan pertama).

Sedangkan informan ketiga mengaku telah mencoba menegur pelaku tetapi tidak dihiraukan.

Saya sudah mencoba menegur tetapi tidak dihiraukan. Akhirnya saya mencoba untuk bilang ke teman lain untuk memberitahunya. Setelah itu saya memilih untuk memblok akun facebooknya saja. (Informan ketiga)

Dari ketiga keterangan tersebut dapat diketahui jika salah satu tantangan privasi dalam hubungan pertemanan adalah kurangnya kepekaan terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Selain itu terdapat kekhawatiran terkait paradigma orang lain apabila melaporkan kasus tersebut. Hal ini yang menjadi paradoks dalam penanganan pelanggaran privasi di media sosial dalam hubungan pertemanan. Hal tersebut disebabkan karena orang-orang hanya peduli tentang pelanggaran privasi jika informasi yang dibagikan sebenarnya dianggap sebagai pribadi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa orang menghubungkan tingkat privasi yang berbeda untuk berbagai jenis informasi tergantung pada masing-masing preferensi privasi (Masur & Scharrow, 2016). Media sosial menantang pemahaman tentang privasi dan rutinitas privasi. Batas-batas sebelumnya antara apa yang ada publik dan apa yang privat menjadi kabur. Berinteraksi dengan rekan-rekan di jaringan rekan yang berbeda menjadi rumit. Sosial media tampaknya memiliki dua jenis keterjangkauan, dengan kata lain, potensi bentuk penggunaan (Trepte, 2015).

Tabel 2. Matriks Pelanggaran Privasi

Narasumber	Potret Privasi	Jenis Pelanggaran
Narasumber 1	Mengambil foto dan menyebarkan tanpa izin	Pelanggaran Informasi pribadi
Narasumber 2	Menyebarkan nomer telepon dan menggunakan foto pribadi untuk dibagikan dalam media sosial beserta keterangan yang kurang pantas	Pelanggaran informasi pribadi
Narasumber 3	Menggunakan foto pribadi orang lain sebagai foto di media sosial facebook dengan tujuan kepentingan pribadi	Pelanggaran informasi pribadi

Berdasarkan analisis tersebut maka dapat dikatakan jika pemahaman privasi setiap individu dan cara mereka memperlakukannya berbeda. Dalam pelanggaran privasi yang diterima, korban pada umumnya mengetahui jika hal tersebut sebuah pelanggaran dan menyebabkan ketidaknyamanan. Namun tidak semua pelaku menyadari jika hal tersebut merupakan sebuah tindakan pelanggaran, sehingga terjadi *gap* pengetahuan dan perbedaan harapan dalam hubungan pertemanan. Pada akhirnya sikap menarik diri menjadi hal yang dipilih atau sekadar teguran dengan harapan tindakan tersebut tidak terulang.

Privasi, Kebebasan Berekspresi dan Literasi

Kebebasan berekspresi dalam ruang digital memberikan potensi terbukanya data pribadi orang lain. Privasi memungkinkan orang untuk mengekspresikan diri secara individu atau kolektif tanpa terlalu khawatir tentang konsekuensi ekspresif mereka. Jika dikaitkan dalam konteks mesin pencari, maka dapat dikatakan jika mesin pencari lebih berdampak daripada web penerbit pada privasi informasi individu. Pencarian mesin pencari dapat melanggar privasi target pencarian lebih serius daripada publikasi informasi pribadi target di web. Privasi informasi seharusnya ditimbang terhadap kebebasan berekspresi demi perlindungan data (Youm & Park, 2016).

Terjadinya penyebaran data pribadi disebabkan karena manusia kurang terliterasi. Literasi dapat berfungsi sebagai prinsip untuk mendukung, mendorong, dan memberdayakan pengguna untuk melakukan informasi kontrol identitas digital. Untuk melakukan langkah-langkah perlawanan yang tepat terhadap potensi penyalahgunaan data pribadi, pengguna media hendaknya dapat memahami aliran data di dunia maya dan batas yang dapat diterima. Oleh karena itu perlu adanya gerakan literasi. Konsep literasi media perlu dilakukan sebagai upaya menciptakan cara bermedia yang baik.

Hal tersebut penting untuk dilakukan karena saat ini, masa depan kita adalah salah satu jaringan di mana-mana, penginderaan terdistribusi, meresap komputasi, kecerdasan ambient, memori digital

tanpa batas dan kuat sistem penambangan data (Lahlou, 2008). Terdapat pemahaman tentang hak-hak individu akan kebebasan berekspresi dan akses ke informasi akan terbukti sangat merugikan. Hal tersebut disebabkan karena jika ingatan pribadi tergantung pada kerangka dan konteks sosial. Namun, masalah yang ada jauh lebih kompleks. Persepsi grup masa lalu mereka yang dimediasi tidak terletak dalam pikiran kolektif yang dibayangkan tetapi pada individu. Walaupun narasi dalam situs telah dihapus, tetapi tetap menjadi objek sampai mereka dibaca atau dirujuk oleh individu yang berpikir secara historis. Oleh karena itu RtbF tidak cukup untuk tujuan ini. Regulasi yang baru dan lebih baik, kerangka kerja, yang mencari keadilan memori, perlu diuraikan dan didasarkan pada serangkaian hak memori, yang dapat disebut sebagai hak atas memori (Tirosh, 2017).

Perlindungan data dan aturan keamanan bertujuan untuk memastikan bahwa data pribadi tidak disalahgunakan atau dikompromikan, dan bahwa konsumen diberi informasi tentang pelanggaran privasi mereka. Data keamanan secara khusus telah dimunculkan sebagai perhatian utama oleh pelanggan dalam hal cloud komputasi, karena ini melibatkan penyimpanan data pelanggan dari jarak jauh oleh cloud (Dynamics, 2016). Kehadiran media sosial di era kemajuan teknologi ini bukan lagi tentang menemukan kebenaran universal melainkan tentang upaya mempertahankan data diri dalam ruang pertukaran informasi.

Untuk mencapai tujuan kepentingan publik, regulasi hubungan penyedia dan distributor konten akan membutuhkan kemauan politik dan pengawasan regulasi yang konstan (Michalis & Smith, 2016). Oleh karena itu, kegiatan di media sosial tetap memiliki norma dan aturan yang perlu diperhatikan sehingga isi informasi yang dihasilkan tetap sesuai dengan norma dan aturan hukum yang berlaku.

Sebagaimana menurut Nabilah Saputri dari SafeNet

Sekarang aturan tentang perlindungan data sudah jadi RUU pun tetap menjadi polemik karena yang diasosiasikan adalah penyedia jasanya bukan individu. Padahal yang diperlukan adalah individu. Padahal individu dalam dunia siber akan memicu kejahatan. Apalagi kecenderungan penduduk Indonesia menggunakan teknologi tanpa melihat buku panduan. Pengguna melihat data sebagai asset yang tidak berwujud karena fokus ke hal yang berwujud. (Nabilah Saputri, Wawancara Pribadi 20 Mei 2019)

Berdasarkan keterangan tersebut dapat diketahui jika perlindungan data individu merupakan hal yang perlu mendapat perhatian serius. Dalam level ini dapat dilihat dari sisi individu sebagai pengguna dan individu sebagai pelaku. Perlu adanya kemampuan seseorang membuat pilihan dan peraturan mengenai apa yang harus dikatakan dan apa yang harus disimpan dari orang lain dengan mempertimbangkan kriteria penting-tidaknya sesuatu yang disampaikan.

Kemampuan ini merupakan upaya konfirmasi diri supaya tidak mudah tersulut emosi, terprovokasi dan menyebarkan berita secara serampangan. Dengan kemampuan manajemen privasi komunikasi diharapkan manusia dapat lebih bijak dalam menyikapi berita yang diperoleh di media dan menyampaikan sesuatu yang diyakini kebaikan dan kebenarannya. Oleh karena itu penting adanya literasi. Menurut Muhammad Iqbal secara psikologis literasi yang cocok

Literasi yang diajarkan untuk menggunakan media sosial untuk edukasi. Perlu adanya kurikulum untuk menggunakan media sosial dengan bijak. Sekarang contohnya instagora jadi salah satu wadah yang disukai millennial karena mudahnya eksistensi. (Muhammad Iqbal, Wawancara Pribadi 21 Mei 2019)

Pendidikan merupakan salah satu cara ampuh membuat perubahan. Terjadinya pembukaan data pribadi disebabkan karena manusia kurang terliterasi. Literasi dapat berfungsi sebagai prinsip untuk mendukung, mendorong, dan memberdayakan pengguna untuk melakukan informasi kontrol identitas digital. Untuk melakukan langkah-langkah perlawanan yang tepat terhadap potensi penyalahgunaan data pribadi, pengguna media hendaknya dapat memahami aliran data di dunia maya dan batas yang dapat diterima (Park, 2013). Oleh karena itu perlu adanya gerakan literasi. Konsep literasi media perlu dilakukan sebagai upaya menciptakan cara bermedia yang baik.

KESIMPULAN

Privasi memberikan tantangan dalam hubungan pertemanan. Konflik antara privasi individu dalam hubungan pertemanan disebabkan karena kurangnya pembatasan dalam hal fotografi di media sosial. Terjadi bias antara pemaknaan pertemanan, kebebasan berkespresi di ruang digital dan tantangan menjaga privasi. Penggunaan kata privasi dalam komunikasi yang di mediasi oleh komputer seakan menghilangkan makna defnisi diri dan batas informasi pribadi orang lain. Hak atas privasi dan kebebasan berekspresi perlu diseimbangkan dengan tanggung jawab sosial. Berbagai pelanggaran privasi yang terjadi dalam hubungan pertemanan disebabkan kurangnya pengetahuan. Selain itu ketika telah terjadi pelanggaran biasanya korban memilih untuk tidak mempermasalahakan dalam tataran hukum walaupun merasakan ketidaknyamanan. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman dan kemampuan dalam diri individu untuk bijak dalam memilih informasi yang perlu disampaikan maupun disimpan terutama dalam batas privasi dalam hubungan pertemanan.

REFERENSI

- Baghai, K. (2012). Privacy as a Human Right : A Sociological Theory. <https://doi.org/10.1177/0038038512450804>
- Barth, S., de Jong, M. D. T., Junger, M., Hartel, P. H., & Roppelt, J. C. (2019). Putting the privacy paradox to the test: Online privacy and

- security behaviors among users with technical knowledge, privacy awareness, and financial resources. *Telematics and Informatics*, 41(February 2019), 55–69. <https://doi.org/10.1016/j.tele.2019.03.003>
- Bhasin, M. L. (2006). Guarding Privacy on the Internet. *Global Business Review*, 7(1), 137–156. <https://doi.org/10.1177/097215090500700109>
- Cooper, S. (2011). Common law, and privacy in computer-mediated environments. *New Jersey Journal of Communication*, 5(2), 167–177. <https://doi.org/10.1080/15456879709367326>
- Dynamics, U. T. H. E. (2016). COMMONWEALTH TELECOMMUNICATIONS ORGANISATION UNDERSTANDING THE DYNAMICS OF Over-The-Top (OTT) SERVICES CTO Research Study, (October).
- Fischer-Hübner, S., & Hedbom, H. (2013). Benefits of Privacy-Enhancing Identity Management. *Asia Pacific Business Review*, 4(4), 3–13. <https://doi.org/10.1177/097324700800400401>
- Gai, K., Qiu, M., Xiong, Z., & Liu, M. (2018). Privacy-preserving multi-channel communication in Edge-of-Things. *Future Generation Computer Systems*, 85, 190–200. <https://doi.org/10.1016/j.future.2018.03.043>
- Griffin, E. (2011). *A First Look at Communication Theory (8th ed)*. McGraw Hill.
- Joinson, A. N., Reips, U. D., Buchanan, T., & Schofield, C. B. P. (2010). Privacy, trust, and self-disclosure online. *Human-Computer Interaction*, 25(1), 1–24. <https://doi.org/10.1080/07370020903586662>
- Lahlou, S. (2008). Identity, social status, privacy and face-keeping in digital society. *Social Science Information*, 47(3), 299–330. <https://doi.org/10.1177/0539018408092575>
- LaRose, R., & Cho, H. (1999). Privacy issues in Internet surveys. *Social Science Computer Review*, 17(4), 421. Retrieved from <http://ssc.sagepub.com/cgi/content/abstract/17/4/421>
- Masur, P. K., & Scharkow, M. (2016). Disclosure Management on Social Network Sites: Individual Privacy Perceptions and User-Directed Privacy Strategies. <https://doi.org/10.1177/2056305116634368>
- Michalis, M., & Smith, P. (2016). The relation between content providers and distributors: Lessons from the regulation of television distribution in the United Kingdom. *Telematics and Informatics*, 33(2), 665–673. <https://doi.org/10.1016/j.tele.2015.07.001>
- Miles, M. (2015). Photography, Privacy and the Public. *Law, Culture and the Humanities*, 11(2), 270–293. <https://doi.org/10.1177/1743872111430277>
- Negara, U. D., Indonesia, R., Indonesia, N., Yang, A., Kuasa, M., Indonesia, P. N., ... Presiden, W. (1945). Amandemen Undang-undang Dasar 1945, Republik Indonesia, 4(1), 1–12.
- Park, Y. J. (2013). Digital Literacy and Privacy Behavior Online.

- Communication Research*, 40(2), 215–236.
<https://doi.org/10.1177/0093650211418338>
- Patton, M. Q. (2002). *Nontraditional Regulations, and Innovations in Darning-Centered, Doctoral Education, Including Faculty Meetings That Are Interesting and Important, an Indication of Knovation of the Highest Order. Qualitative Inquiry*. Retrieved from http://books.google.com/books/about/Qualitative_research_and_evaluation_meth.html?id=FjBw2oi8EI4C
- Petronio, S. (2013). *Boundaries of privacy: dialectics of disclosure. Choice Reviews Online* (Vol. 40).
<https://doi.org/10.5860/choice.40-4304>
- Roessler, B., & Mokrosinska, D. (2013). Privacy and social interaction. *Philosophy and Social Criticism*, 39(8), 771–791.
<https://doi.org/10.1177/0191453713494968>
- Tirosh, N. (2017). Reconsidering the 'Right to be Forgotten' – memory rights and the right to memory in the new media era. *Media, Culture and Society*, 39(5), 644–660.
<https://doi.org/10.1177/0163443716674361>
- Trepte, S. (2015). Social Media , Privacy , and Self-Disclosure : The Turbulence Caused by Social Media ' s Affordances.
<https://doi.org/10.1177/2056305115578681>
- UU No. 20 Tahun 2008. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia. *UU No. 20 Tahun 2008*, (1), 1–31.
- von Pape, T., Trepte, S., & Mothes, C. (2017). Privacy by disaster? Press coverage of privacy and digital technology. *European Journal of Communication*, 32(3), 189–207.
<https://doi.org/10.1177/0267323117689994>
- Youm, K. H., & Park, A. (2016). The "right to be forgotten" in European Union law: Data protection balanced with free speech? *Journalism and Mass Communication Quarterly*, 93(2), 273–295.